

NASIONALISME DALAM *AN-NIDĀ'U AL-KHĀLID* KARYA NAJĪB KAYLĀNĪ

Nationalism in Najīb Kaylānī's an-Nidā'u al-Khālīd

Yulia Nasrul Latifi¹ dan Faruk²

Program Studi Sastra

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The material object of this research is a modern Egyptian novel entitled *an-Nidā'u Al-Khālīd*, written by Najīb Kaylānī. The formal object is post-colonial perspective focused on nationalism aspect using deconstruction method. The result of the research revealed that the writer, in mobilizing his notion of nationalism, preferred synthesis between two expressions of nationalism. Both of expressions were ambivalence, namely *tradition rhetoric*: a tendency to see back to the past, religion, and tradition; and *development rhetoric*: an inclination to see beyond the future, the West with their modern issues, rationality, globalization, gender, and science. The concept of nationalism of the novel itself is also ambivalence due to its expectations of universality and unity, which in fact are denied by it. This can be seen in the emergence of the variety of universality and unity, each of which is expected by the novel in conceptual terms (metaphysic) and occasional terms (physic). Before the freedom, it has seemed that the realization of the universal unity was warranted. However, after the freedom, the idea of fissure spread in the novel, both in conceptual terms (metaphysic) and occasional terms (physic), in which the actors experienced. The novel, then, offered the idea of post-nationalism that was characterized by a hybrid and diasporic cultural identity. Post-nationalism was geared to the understanding of a mutual and dialogic culture other than a simple process of active-passive between the West-East. Since the narrow conscience of nationalism is established in the circumstances of limited situation of the socio-cultural of colonial.

Key words: nationalism, universality, deconstruction

¹ Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

² Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

PENGANTAR

Sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa Dunia Ketiga mayoritas memiliki persoalan dengan apa yang disebut kolonialisme. Dengan tegas, E. M. Foster dalam novelnya *A Passage to India* menyatakan bahwa kolonialisme itu lebih dari sekedar kekacauan sementara sebab kolonialisme telah menjadi alam sendiri (Dirks, 1992: 1).

Di sinilah Said (1996: 12-13) menekankan pentingnya narasi atau karya sastra karena cerita-cerita merupakan inti dari apa yang dikatakan oleh para penjelajah dan novelis mengenai wilayah dunia yang aneh, dan dijadikan metode yang digunakan bangsa terjajah untuk menegaskan jati diri dan eksistensi sejarah mereka sendiri. Lebih lanjut, Said (1996: 104) menegaskan bahwa realitas-realitas kolonial dan imperial ini diabaikan dalam kritik (termasuk sastra), yang mestinya dapat menjadi luar biasa cermat dan kaya dalam menemukan tema-tema untuk dibahas.

Di antara sekian banyak persoalan yang diakibatkan oleh kolonialisme adalah isu mengenai nasionalisme. Dalam kajian kesastraan yang dihasilkan oleh negara Dunia Ketiga, isu mengenai nasionalisme tersebut dianggap penting karena merupakan salah satu fokus terbesar bagi penolakan kontrol imperial dalam masyarakat terjajah (Ashcroft dkk, 1995: 151).

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena yang menarik untuk digarisbawahi adalah adanya penggugatan tentang ide nasionalisme yang terjadi pada permulaan abad XXI saat ini. Ide tentang nasionalisme sedang mengalami hantaman yang cukup kuat, dikarenakan konsep bangsa yang diredusir dari keberhasilan imperialisme Barat terhadap Timur terkoreksi tajam dengan munculnya kesadaran "bangsa-bangsa" baru dalam negara-bangsa (*nation-state*) yang memerdekakan diri dari penjajahan.

Berkaitan dengan pengalaman kolonialisme, kajian terhadap karya sastra Mesir modern dengan perspektif post-kolonial dianggap penting, mengingat Mesir adalah salah satu negara Arab pertama di Timur Tengah yang mendapat pengaruh langsung dari Eropa. Menurut Sa'dawi (1980: 170), selama bertahun-tahun Mesir masih menjadi jantung dunia Arab karena posisi yang strategis, jumlah penduduknya yang banyak, dan sejarah panjangnya melawan kolonialisme dan imperialisme. Seringkali Mesir memainkan peran sebagai pelopor revolusi dalam pergerakan politik negara-negara Arab, sekaligus sebagai pusat kebudayaan terpenting.

Dari sekian banyak novelis Mesir terkenal yang banyak menghasilkan karya sastra modern adalah Dr. Najīb Kaylānī. Dia adalah seorang dokter sekaligus novelis produktif yang dibesarkan tatkala Mesir berada di bawah penjajahan Inggris. Pengarang, yang telah menulis karya fiksi ataupun non-fiksi yang tidak kurang dari 59 buku, sering mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan. Karya-karyanya telah diterjemahkan kedalam bahasa Italia, Turki, Rusia serta Inggris (al-'Arīnī, tt: 18, 29).

An-Nidā'u al-Khālīd (panggilan abadi) adalah salah satu novel modern Mesir karya Najīb Kaylānī yang diterbitkan pada tahun 1969 M. Novel mengisahkan penderitaan dan perjuangan bangsa Mesir dalam usaha mereka untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang justru menarik dari novel tersebut adalah ide atau gagasan mengenai nasionalisme, dikarenakan gagasan yang ditawarkan novel adalah gagasan mengenai masih berlangsungnya fenomena penjajahan yang dialami bangsa Mesir (terjajah), meskipun para penjajah (orang-orang Eropa sebagai penjajah yang pertama dan asli) itu sendiri telah pergi dan berlalu. Hal ini disebabkan penjajahan tersebut diteruskan oleh pribumi sendiri.

Beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) retorika tradisi dan retorika pembangunan novel: sebuah ambivalensi dan sintetis; (2) konsep nasionalisme novel yang ambivalen, sebab gagasan universalitas atau persatuan yang diangankan novel dalam tataran konsep (metafisis) dan peristiwa (fisik) ternyata menyembunyikan gagasan keretakan pada tataran konsep (metafisis) maupun peristiwa (fisik); dan (3) gagasan post-nasional yang ditawarkan novel yang bercirikan hibriditas dan diaspora, yang lebih mengarah pada pemahaman budaya yang mutualistik dan dialogis daripada hubungan yang sederhana, aktif-pasif, antara Barat dan Timur.

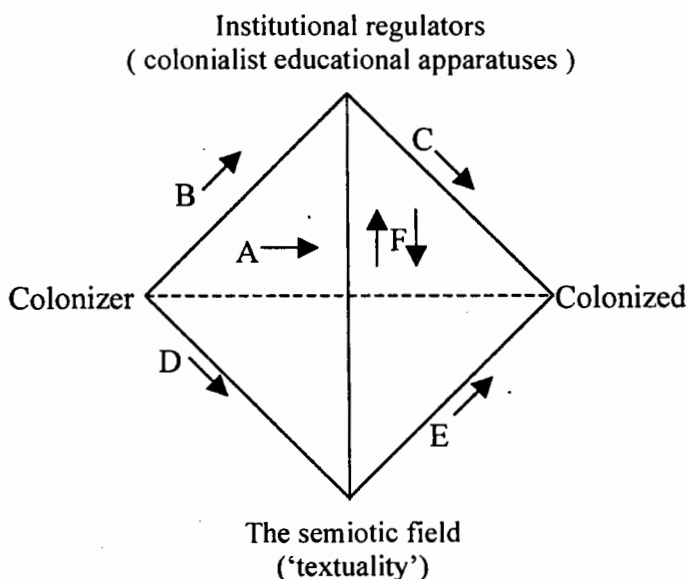
Penelitian menggunakan teori post-kolonial. Dari perspektif ini, rumusan mengenai kebudayaan terjajah dapat dipahami bahwa: (1) kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat terjajah tidak dapat dipahami di luar konteks penjajahan; (2) kebudayaan-kebudayaan dari masyarakat terjajah dipengaruhi oleh keadaan atau situasi dan kondisi yang diciptakan oleh kolonialisme; (3) pengaruh kolonialisme terhadap kebudayaan masyarakat terjajah dapat terus berlangsung meskipun penjajahan sudah berakhir dan dapat terus beroperasi meskipun dalam perlawanan itu sendiri; (4) mendalam dan lamanya pengaruh kolonialisme disebabkan oleh cara penanaman kekuasaan yang sistematis, melibatkan praktek, teori, dan sikap secara menyeluruh.

Hal penting yang perlu diungkapkan menurut Bhabha (dalam Ashcroft dkk., 1998: 12-13), bahwa salah satu ciri yang ditemukan dalam setiap kajian postkolonial adalah adanya ambivalensi-ambivalensi, sikap yang selalu mendua. Kalau "anti-kolonial" mengacu pada perlawanan kaum terjajah yang menentang institusi politik, ekonomi, dan budaya kolonial, tetapi "post-kolonial" lebih memperhatikan sifat-sifat dari alam kolonial dan warisannya di alam post-kolonial yang ditandai oleh: perebutan, ambivalensi, dan ketidakmampuan makna (Foulcher, 1994: 16).

Dengan nada yang sama, Lo dan Gilbert (1998: 2) mengajukan konsep tentang "wacana perlawanan" (*resistance*) bagi teori post-kolonial. Hanya saja perlawanan tersebut ada dalam proses yang tidak sederhana dan drastis, yang serta merta menghasilkan wacana alternatif yang radikal. Hal ini sesuai dengan temuan Fanon tentang ketidakstabilan dalam formasi identitas di masa pendobrokan kolonial, dan juga pembahasan Memmi tentang posisi ambivalen penjajah yang membenci penjajahan.

Sebenarnya, yang mendasari teori ini adalah gugatan Said tentang wacana “Timur” melalui *Orientalisme*-nya, sebagai produksi ilmu pengetahuan yang mempunyai landasan ideologis dan kepentingan-kepentingan kolonial. Para penulis yang mencakup para penyair, novelis, filosof, teoritikus politik, ekonom dan para administrator negara, menerima perbedaan dasar antara Timur dan Barat ini sebagai titik tolak untuk menyusun teori-teori, epik-epik, novel-novel, deskripsi-deskripsi sosial dan perhitungan-perhitungan politik yang cermat mengenai dunia Timur; rakyatnya, adat-istiadatnya, “pikiran-pikirannya”, nasib yang ditakdirkan baginya, dan lain sebagainya (Said, 2001: 3).

Konsep atau wacana yang dikembangkan oleh Said di atas, bila direpresentasikan dengan sebuah bagan, tercakup dalam struktur atau bagan yang ditawarkan Slemon (dalam Ashcroft dkk., 1995: 46-47) seperti terlihat berikut ini:



Garis atas, (*Institutional regulators*) adalah alat pengontrol dan pengatur dari penjajah yang melembaga dan punya fungsi untuk “mengajari”. Ini berupa pusat-pusat studi, lembaga pendidikan, media dan lain-lain, yang digunakan untuk menguasai *colonized* oleh *colonizer* melalui teks-teks, wacana-wacana (semiotics). *Garis tengah* (*colonizer-colonized*) memiliki relasi yang bersifat dominatif dan hegemonik, sebab memiliki kepentingan-kepentingan penjajah terhadap yang di jajah. Bentuk-bentuk hegemoni tersebut berupa: bahasa, kanonisitas, nasionalisme, tubuh, hibriditas, etnisitas, feminisme dan lain-lain. *Garis bawah* (*the semiotic field*) punya fungsi mendeskripsikan, menyatakan, melalui wacana-wacana, teks-teks dan lain-lain.

Said memakai konsep “wacana” (*discourse*) yang telah dikembangkan oleh Michel Foucault. Salah satu implikasi penting dari konsep wacana Foucault adalah pemahaman tentang “kekuasaan yang menyebar dan produktif” yang berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah suatu kapasitas atau entitas yang dimiliki oleh satu pihak, yang kemudian dapat ditransfer atau diambil alih oleh pihak lain. Baginya, kekuasaan diibaratkan sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana (dalam Sarup, 1988: 80).

Gugatan yang dimunculkan oleh Said seperti inilah, juga struktur pemahaman identitas budaya-budaya dalam hubungan penjajah-terjajah seperti bagan yang ditawarkan Slemon di atas, akhirnya membawa Peck dan Coyle (1993: 137) pada sebuah rumusan bahwa tujuan pendekatan post-kolonial ini adalah “*to undo the binary oppositions...emphasizing the plurality of differences (between Western and Eastern culture) rather than (its difference) fixed as opposition*”.

Menurut Lo dan Gilbert (1998: 1-2), teori post-kolonial yang menyangkut bidang produksi dan analisis budaya tersebut memiliki batasan-batasan dalam wilayah kajiannya yang dapat dipahami dalam tiga pendekatan, yaitu: secara historis, *counter-diskursif*, dan secara ekonomis. Lebih jauh lagi, Lo dan Gilbert (1998: 5-13) mempetakan wilayah-wilayah analisis dalam studi literer post-kolonial tersebut menjadi enam aspek, yaitu: 1). Bahasa, 2). Sejarah atau kesejarahan, 3). Nasionalisme, 4). Kanonisitas, 5). *Body politics*, dan 6). Tempat (*space/place*). Sedang beberapa kemungkinan keagenan yang tercakup dalam studi ini adalah hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Sementara Ashcroft dkk.(1995) memasukkan juga aspek-aspek lain yang termasuk wilayah kajian post-kolonial, yaitu; representasi dan resistensi, etnisitas, feminisme, pendidikan, dan produksi.

Penelitian ini akan difokuskan pada aspek nasionalisme, Hal ini didasarkan pada asumsi akan pentingnya gagasan nasionalisme tersebut dalam karya novel yang dihasilkan oleh negara Dunia Ketiga yang merupakan salah satu fokus terbesar bagi penolakan kontrol imperial dalam masyarakat terjajah dengan sekian banyak persoalan yang problematic (Ashcroft dkk, 1995: 151).

Beberapa definisi yang ditawarkan oleh para ahli, secara umum, memberikan satu pengertian bahwa konsep nasionalisme berkaitan dengan satu paham yang menyatakan bahwa, *pertama*, manusia harus merdeka dengan kemerdekaan yang tidak hanya bersifat individual, akan tetapi juga bersifat kolektif. *Kedua*, perasaan cinta yang mendalam akan negeri sendiri selalu menyertai konsep tersebut.

Salah satu konsekuensi dari pemahaman tradisional tentang nasionalisme, pada umumnya, menciptakan satu sikap penyakralan bangsa agar tetap bersatu dan tidak berubah. Sebuah pendapat yang

mengkritisi fenomena di atas menyatakan bahwa hal tersebut lebih disebabkan karena para pemikir nasionalisme tradisional tersebut punya asumsi saat terbentuknya bangsa, maka pada saat itu terdapat satu kewajiban semesta (*universe of obligation*), yang mengikat kesetiaan seluruh masyarakat pada kepatuhan sejarah terbentuknya sebuah negara bangsa (*nation-state*) mereka. Sejarah terbentuknya bangsa itulah (*historis-romantis*) yang dijadikan tumpuhan argumentasi bagi penyakralan ide nasionalisme (Fasya, 2000: 161).

Anderson, yang corak pemikirannya antropologis, membongkar kembali pemahaman usang dari nasionalisme lama tersebut. Ia menawarkan gagasannya bahwa nasionalisme lebih menyerupai sebuah komunitas politis dan 'dibayangkan' sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan (2001: 8-9). Dikatakan sebagai *komunitas* karena hal tersebut dipahami sebagai sebuah perserikatan yang dalam, horisontal, membangun semacam hubungan persaudaraan antar-anggotanya. Dikatakan sebagai *produk imajinasi* karena hubungan antar-anggotanya sebagian besar tidak terjalin dalam hubungan tatap muka. Bersifat *terbatas* disebabkan bangsa-bangsa paling besar pun memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. *Berdaulat*, karena konsep ini lahir dengan ditopang oleh akar kultural yang kuat bersamaan dengan memudarnya komunitas agama dan komunitas dinastik (2001: 8-11).

Menurut Ashcroft, dkk. (dalam Fasya, 2000: 163-164), wacana inilah yang dalam kacamata post-kolonial ditempatkan dalam posisi penting dan mendapat apresiasi lebih, yaitu upaya masuk pada relung-relung yang selama ini tidak tercatat dengan baik. Wacana pinggiran, yang selama ini menjadi sejarah tak tertulis, perlu dikedepankan, berada dalam konsep nasionalisme, serta mendesakralisasi konsep bangsa yang ada. Kebebasan yang dimiliki post-kolonial di sini adalah dengan memberikan upaya pernyataan diri sebagai sebuah proses dan kemampuan untuk mengkonstruksi konsep dunia (*worldview*) agar menjadi kebenaran kontekstual.

Menurut Frantz Fanon, pengertian nasionalisme dalam post-kolonial dapat dirumuskan sebagai keseluruhan bentuk dari upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam ruang pemikiran untuk menggambarkan, menjustifikasi dan memuji suatu tindakan melalui apa yang dibuat oleh masyarakat dan dijaga keberadaannya (Ashcroft, Bill, dkk., 1995: 151). Sementara Lo dan Gilbert (1998: 8) menekankan bahwa teori post-kolonial melihat nasionalisme sebagai satu upaya pembangkitan tindakan-tindakan afiliasi untuk mengumpulkan

kelompok-kelompok yang beraneka ragam di bawah satu simbol entitas politik, pemerintahan, dan ekonomi sebuah bangsa.

Bila dikaitkan dengan gerakan dan pemikiran sastra, gagasan akan ide nasionalisme tersebut, menurut Foulcher (dalam Faruk, 1994: 4), dapat dikatakan sebagai pembangunan sebuah dunia atau wilayah sastra yang di dalamnya para sastrawan dapat merealisasikan dirinya sebagai subjek yang mandiri dan bebas, yang dianggap mempunyai kemampuan yang sama dengan orang-orang lain yang dianggap sudah bebas dan mandiri.

Dalam usahanya untuk mewujudkan gagasan nasionalisme sebagai cermin kehendak bebas tersebut, menurut Lo dan Gilbert (1998: 8), para sastrawan (representasi dari kultur-kultur terjajah) pada umumnya memobilisasi dua diskursus untuk menguatkan dukungan lokal bagi nasionalisme. *Pertama*, retorika pembangunan, yaitu suatu visi ke depan yang mengasumsikan pentingnya kemerdekaan dari kontrol kolonial agar meraih suatu identitas otonom. *Kedua*, retorika tradisi, suatu visi kebelakang yang membiarkan kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek kerakyatan dan gagasan-gagasan tentang asal-usul agar mengelastikan ikatan-ikatan antar-orang yang berbeda-beda demi memperbaiki bangsa post-kolonial tersebut.

Dalam kaitan dengan hal ini, Bhabha berpendapat (dalam Lo & Gilbert, 1998: 8-9) bahwa ambivalensi selalu membayangi konsep tentang Bangsa. Ambivalensi ini melekat dalam situasi saling mempengaruhi yang menegangkan antara dua kekuatan yang disebutnya *pedagogical* dan *performative*. Nasionalisme berada dalam tekanan antara dua kekuatan tersebut yang terdapat dalam bangsa itu sendiri sebagai bentuk liminal dari representasi sosial, yaitu secara internal ditandai oleh perbedaan kultural dan sejarah-sejarah yang heterogen dari masyarakat yang saling bersaing, otoritas yang antagonistik, dan lokasi-lokasi kultural yang menegangkan.

Berkaitan dengan nasionalisme, yang sebenarnya ada dalam kondisi transisional dalam proyek dekolonisasi seperti di atas, Gandhi (2000: 164) mengusulkan adanya arahan dalam post-kolonial menuju solidaritas ekstra atau solidaritas post-nasional, yang mempertimbangkan konsep-konsep seperti "hibriditas" dan "diaspora" yang muncul untuk memberi ciri kebudayaan global maupun campuran guna mencapai transformasi mutual penjajah dengan yang dijajah.

Kecenderungan terakhir teori hibriditas ini selalu dikaitkan dengan pendapat Bhabha (dalam Aschroft, Bill, dkk., 1998: 118-119) tentang relasi antara penjajah-terjajah yang menekankan pada aspek kesaling-

tergantungan dan konstruksi mutualisme subjektifitas antara keduanya. Konsep hibriditas ini mencoba menekankan pada proses mutualitas budaya kolonial dan post-kolonial dalam ekspresi sinkrititas, sinergi budaya, dan transkulturasi. Diaspora yang mempunyai arti untuk menyebarkan, menurut Aschroft dkk (1998: 68), dapat dipahami sebagai perpindahan atau penyebaran penduduk secara sukarela atau dengan paksaan kekerasan dari tanah airnya menuju wilayah baru.

Dalam pengertian Fanon, tuntutan akan solidaritas yang lebih besar dan ekspansif ini pada akhirnya lebih memaksa ketimbang solidaritas budaya nasional. Idealnya, kesadaran nasional seharusnya membuka jalan bagi timbulnya komunitas global yang tercerahkan secara politis dan etis (Gandhi, 2001: 165).

Dari sudut pandang literer, nasionalisme berada dalam interes khusus karena seperti dikatakan Bhabha dan Brennan, bahwa nasionalisme adalah koterminus (bersifat eksklusif) dengan perkembangan bentuk modern yang paling dominan, setidaknya-tidaknya di Eropa dan kultur-kultur yang dipengaruhi Eropa. Ikatan-ikatan antara sastra dan bangsa ini menimbulkan suatu rasa kualitas fiktif dari konsep politik itu sendiri. Dalam hal ini kisah tentang bangsa dan bentuk narasi dari novel modern tersebut saling mengin-formasikan satu sama lain dalam suatu cara yang kompleks dan refleksif (Aschroft, Bill., dkk, 1995: 152).

CARA PENELITIAN

Dalam upaya memecahkan masalah seperti yang telah diutarakan, dalam penelitian ini digunakan metode dekonstruksi. Metode ini dipahami dalam pengertian post-strukturalis, artinya relasi unsur-unsur yang ada tidak dipahami dalam kerangka kesatuan tapi dalam kerangka keberagaman dan ketersebaran.

Dengan metode tersebut, langkah-langkah atau tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah, membongkar dua bentuk retorika ide nasionalisme yang terekam dalam novel sebagai penolakan pribumi terhadap hegemoni kolonial, yang ambivalen dan bersifat sintetis; membongkar gagasan nasionalisme novel yang ambivalen; serta mengungkap idealisasi post-nasionalisme dalam bentuk hibriditas dan diaspora.

Keseluruhan rangkaian analisis di atas ditempatkan dalam kerangka pikir dekonstruksi, membalikkannya untuk menunjukkan kontradiksi atau mengaburkan hierarkhi atau batasan antara keduanya. Dengan

kerangka piker ini akan terbongkar bagaimana gagasan nasionalisme post-kolonial dalam novel.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil analisis novel *an-Nidā'u al-Khālīd* menunjukkan adanya gagasan nasionalisme yang terekspresi melalui dua retorika, yaitu retorika tradisi dan retorika pembangunan yang sama-sama ambivalen. Retorika tradisi novel meliputi: agama, sejarah atau masa lalu, dan tradisi. Ambivalensinya, misalnya, agama yang dipakai sebagai alat pembebasan dari kontrol kolonial ternyata agama juga yang dipakai para penguasa elit pribumi sendiri untuk melegitimasi penjajahan di negerinya sendiri. Sejarah atau pengagungan masa lalu mereka juga ambivalen sebab pribumi menegaskan jati diri dan identitas kultural mereka bagi upaya pembebasan kontrol imperial tersebut dengan mengagung-agungkan masa lalu dan sejarah mereka yang pernah menjadi bangsa besar. Akan tetapi, mereka ternyata juga mengkritik kondisi mereka yang jauh dari kemajuan: *illiterate*, tidak menguasai menejemen perang, dan tidak menguasai teknologi.

Retorika pembangunan novel meliputi: gagasan modernitas, ilmu pengetahuan, rasionalisasi, globalisasi dan gender. Dikatakan ambivalen, dikarenakan para reformis yang merumuskan masa depan Mesir dengan mengandaikan model Barat yang dipujanya, ternyata mereka juga tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai ke-Timuran yang menjadi pembeda dari Barat. Hal ini terlihat, misalnya, tiga tokoh nasionalis seperti 'Anbah, Ahmad dan Šābirīn dalam mengembangkan gagasan-gagasan rasionalitas dan modernitasnya, mereka ternyata tetap mendasarkan diri pada gagasan para tokoh pribumi sendiri. Mereka juga menjadikan "agama" sebagai *platform* bagi pengembangan pemikiran nasionalisme yang secara terus menerus mereka dialogkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer.

Karena ambivalensi pada dua retorika tersebut, pengarang akhirnya lebih memilih gagasan mengenai sintesis antara dua retorika tersebut, sintesis antara Barat dan Timur, memadukan keduanya, dan tidak mempertentangkannya secara rigid. Ini dapat dilihat dan dicermati bagaimana seluruh tokoh novel membangun dan mengembangkan pemikirannya.

Konsep nasionalisme yang ditawarkan novel juga ambivalen karena gagasan universalitas atau persatuan yang ada dalam novel tersebut menyangkal dirinya sendiri. Gagasan universalitas atau persatuan yang diangankan novel sebelum kemerdekaan tersebut meliputi: persatuan

pada tataran konsep (metafisis), dan persatuan pada tataran peristiwa (fisik). Tataran konsep berupa: (1) universalitas kesamaan cita-cita dan tujuan para pejuang Mesir; (2) universalitas yang tersimbol "hanya ada satu sosok" pembentuk aspirasi politik (nasionalisme) Mesir; (3) universalitas berupa pengakuan pentingnya kesadaran gender; (4) universalitas dengan konsep *Syāmil* (menyeluruh) yang muncul dalam gagasan para tokoh.

Universalitas pada tataran peristiwa (fisik) yang dialami para tokoh berupa: (1) bersatunya 'Abd al-'Azīs Syālbī dengan rakyat sebab telah dibebaskan dari tahanan Inggris; (2) bersatunya kepala desa dengan rakyat dengan pertaubatannya untuk tidak lagi menindas rakyat; (3) bersatunya kepala desa dengan 'Abd al-'Azīs Syālbī setelah bertahun-tahun bertikai; (4) bersatunya Ahmad Affandī Syālbī dengan Šābirīn dalam ikatan percintaan mereka; (5) membaiknya kesehatan fisik kepala desa setelah sakit cukup lama; (6) terbebasnya Abū al-Ma'atī as-Syāfi'i dari tahanan penjajah; (7) terbebasnya keempat tokoh desa atas tuduhan gerakan di bawah tanah.

Keseluruhan gagasan universal tersebut menempati bagian pertama novel (bab ke-1 sampai ke-14), bagian yang berisi persiapan revolusi kemerdekaan Mesir. Secara kuantitas, gagasan penggalangan nasionalisme dengan strategi persatuan seperti ini, porsiya melebihi separo penceritaan novel. Novel memiliki 236 halaman, terdiri dari dua bagian yang semuanya berjumlah 23 bab. Penceritaan proses penyatuan tersebut (masa pra-kemerdekaan) diungkapkan sampai bab ke-17. semua ini menunjukkan tingginya intensitas penceritaan secara kuantitatif. Kelanjutan novel menceritakan kemerdekaan Zafī, sebuah distrik kecil di Mesir, yang langsung diiringi proklamasi sebagai pemerintahan independen dan simbolisasi-simbolisasi yang lain yang mengarah pada penegasan independensi. Gagasan universalisme tersebut ditutup dengan bersatunya Ahmad dan Šābirīn dalam ikatan pernikahan (lebih sebagai simbol penyatuan pemikiran) yang juga menyimbolkan keabadian dan finalitas, sebab pernikahan tersebut saling melengkapi dan mengukuhkan bangun nasionalisme Mesir yang telah dirintis 'Anbah lalu dimatangkan generasi penerusnya, Ahmad dan Šābirīn.

Akan tetapi, bila pembacaan yang ada dilakukan dari perspektif post-kolonial, gagasan universalitas yang dibangun novel tersebut ternyata selalu menyangkal dirinya sendiri sebab mengandung gagasan-gagasan partikula-ritas. Dikatakan ambivalen karena dalam istilah

Faruk (1994: 63), mereka mengukuhkan sesuatu yang ingin ditolaknya, melanjutkan tali yang ingin diputusnya.

Gagasan partikularitas yang diangankan dalam novel ditemukan, baik pada tataran konsep (metafisis) maupun pada tataran peristiwa (fisik) para tokoh. Keretakan pada tataran konsep (metafisis) berupa: (1) pemberian judul novel *an-Nidā'u al-Khālīd* yang berarti "panggilan abadi"; (2) penamaan *Khālīd* (abadi) pada anak Ahmad dan Šābirīn dan profesinya "pakar listrik" sebagai simbol ketertundaan cita-cita nasionalisme; (3) penyebaran gagasan mengenai *tūfān* (bandang) yang diulang-ulang novel; (4) gagasan bahwa revolusi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berupa ide dan pemikiran.

Gagasan partikularitas, yang diangankan novel, yang ada pada tataran peristiwa para tokoh (fisik) berupa: (1) keretakan sikap Khalāf 'Abd al-Mutajallī (kepala desa) yang kembali mempraktikkan sikap dan perilaku kolonialisme dalam keragaman bentuk, yaitu, arogansi kekuasaan, legitimate penindasan dengan tafsir agama dan otoriter, penindasan kultural terhadap Šābirīn (anak perempuannya) yang disertai kekerasan fisik. Gagasan mengenai penindasan pribumi oleh elit penguasa dari pribumi sendiri juga bertebaran dalam novel; (2) pengingkaran Koran *al-Jumhūr* atas kekosmopolitannya; (3) Peristiwa 'Anbah pulang ke desa dan Koran tidak terbit lagi. (4) keretakan antar elit-politik, yaitu silat lidah antara Ahmad dan 'Anbah yang berakhir dengan penolakan Ahmad atas makalah 'Anbah tentang kebijakan pasca-revolusi; (5) keretakan semangat juang 'Abd al-'Azīs as-Syalbī; (6) keretakan semangat juang Ibu Ahmad dengan melarang Ahmad pergi ke Zafī ketika dimasuki tentara Australia.

Bila gagasan universalitas ditemukan pada bagian pertama novel, maka gagasan mengenai partikularitas ini ditemukan pada bagian kedua novel, yaitu bagian yang berisi tentang penceritaan revolusi dan pencapaian kemerdekaan Zafī (Mesir). Disinilah, ambivalensi nasionalisme post-kolonial muncul sebab nasionalisme dipakai sebagai alat bagi pribumi untuk membebaskan mereka dari kontrol kolonial, tetapi setelah merdeka, nasionalisme juga dipakai mereka untuk menggalang orang untuk menindas pribumi sendiri yang berarti melanggengkan penjajahan itu sendiri.

Berkaitan dengan nasionalisme yang penuh parodi dan tidak aman bagi dirinya yang ada dalam proyeksi dekolonisasi seperti di atas, akhirnya novel menawarkan gagasan mengenai post-nasional, yaitu gagasan yang mempertimbangkan konsep-konsep seperti hibriditas dan diaspora.

Puncak aspek hibriditas konsep nasionalisme berada pada bab terakhir novel yang bersifat eksplisit, yaitu pernyataan 'Anbah dalam pidatonya bahwa konsep nasionalisme yang dia sosialisasikan selama ini adalah berasal dari orang Eropa sendiri yang bernama Tuan Balnat. Bahkan, Tuan Balnat juga yang menyadarkan pribumi Mesir akan hak-hak asasi mereka sebagai sebuah bangsa yang harus diperjuangkan pribumi sendiri, yang selama ini telah direbut oleh penjajah, juga dijelaskan bagaimana cara memperjuangkan semua itu.

Dalam eksplorasi novel, hibriditas nasionalisme pribumi yang terungkap berupa: (1) para elit pribumi menyandarkan seluruh gagasannya pada para tokoh yang semuanya mendapatkan didikan dan pencerahan Barat, secara langsung maupun tidak langsung; yaitu, 'Anbah pada Jamāluddīn al-Afghānī, Ṣābirīn pada Qāsim Amīn, Ahmad pada al-Muwaylihī; (2) Ahmad Affandī adalah elit pribumi yang bilingual; (3) koran atau media cetak sebagai sarana sosialisasi gagasan nasionalisme Mesir; (4) gagasan nasionalisme pribumi dibentuk melalui serapan buku-buku terjemahan Eropa.

Aspek hibriditas lain yang bisa turut menetralisasi dan mengeliminasi pencitraan Barat yang selalu negatif oleh pribumi, misalnya, realitas yang juga dimunculkan novel bahwa pada dasarnya penjajah juga membenci penjajahan. Logika berbalikan juga berlaku sama, yaitu klaim Barat sebagai aktor peradaban juga mendapat gugatan novel sebab sejauh penceritaan novel, proses penindasan Barat terhadap pribumi sangat tidak manusiawi dan tidak memiliki sandaran etis.

Aspek diaspora novel ditunjukkan dengan menyebarnya gagasan mengenai pengungsian dan pembuangan para penduduk desa menuju tempat yang jauh dan mereka tidak pernah kembali lagi, dengan berbagai ekspresi pengungkapan. Informasi yang sering diulang-ulang adalah "mereka dibawa pergi jauh" dan "mereka tidak pernah kembali lagi". Hal ini merupakan kata kunci yang mengarah pada gagasan diasporik tersebut meskipun novel tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Fenomena tersebut dapat memperkuat gagasan post-nasional dalam rangka pemahaman identitas budaya yang lebih bersifat global, campuran, cangkakan, dan hibrid sebab, baik penjajah maupun terjajah, sebenarnya keduanya sama-sama mengambil peranan dalam bagian sejarah masing-masing, dan sama-sama memiliki kontribusi dalam proses pembentukan budaya bersama.

Maka, seperti dikatakan Said, bahwa identitas budaya tersebut memperjelas bagi kita bagaimana jati diri seperti penjajah, yang sebenarnya tidak lebih dari masyarakat penampung imigran yang

tercipta dari lapisan reruntuhan berbagai kehadiran pribumi dari segala penjuru, sehingga identitasnya tidak uniter dan homogen. Gagasan yang lebih makro seperti inilah diharapkan dapat menawarkan kesadaran baru yang memiliki pencerahan etis dan politis, mengenai garis-garis “di antara” kebudayaan-kebudayaan.

Seerti dikatakan Said (1996: 47), hal ini memungkinkan kita melihat sejauh mana kebudayaan-kebudayaan dicipta secara manusiawi menjadi struktur otoritas dan peran serta, yang baik dalam apa yang mereka cakup, manfaatkan, dan absahkan dan yang kurang baik dalam apa yang mereka ingkari dan turunkan.

Realitas di atas memberikan satu pencerahan bagi sandaran etis dan politis, bahwa sejarah semua kebudayaan adalah sejarah pinjam-meminjam budaya. Namun begitu, ia lebih merupakan masalah “pemberian pengalaman bersama dan kesalingtergantungan dalam segala hal yang merupakan norma universal darinya”. Oleh karena itu, bila ada penindasan dari yang kuasa, maka para Tuan kulit putih itu akhirnya akan terusir keluar. Sebaliknya, rakyat pribumi yang menang itu segera menyadari bahwa mereka membutuhkan Barat dalam beberapa hal. Dengan demikian, gagasan post-nasional yang diusulkan novel mendapat ruang yang sangat dipertimbangkan dalam post-kolonial, sebagai usulan yang mendekonstruksi konsep nasionalisme sempit yang dipraktikkan hampir semua bangsa post-kolonial sebagai warisan Barat yang diturunkan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel *an-Nidā'u al-Khālīd* karya Najīb Kaylānī telah mendekonstruksi gagasan nasionalisme yang selama ini dipahami sebagai konsep mapan. Dekonstruksi novel terlihat sejak dari gagasan sintesis antara retorika tradisi dan retorika pembangunan yang lebih dipilih pengarang, dengan tidak dipertentangkannya secara rigit. Gagasan sintesis ini sebagai upaya untuk keluar dari ambivalensi masing-masing yang menunjukkan keterbatasannya. Konsep nasionalisme yang ada juga didekonstruksi novel, disebabkan novel justru menunjukkan adanya ambivalensi. Ambivalensi ini ditunjukkan novel dengan munculnya gagasan mengenai keretakan-keretakan yang mengiringi gagasan persatuan yang diangankan novel baik pada tataran konsep (metafisis) maupun pada tataran peristiwa (fisik) para tokoh. Novel mengusulkan gagasan post-nasional yang bercirikan hibriditas dan diaspora sebagai salah satu alternatif bagi upaya pembebasan, untuk bisa keluar dari jaring-

jaring sosio-kultural kolonial yang mengkonstruksinya, yang seringkali tidak memberikan kesadaran baru yang bermuatan etis dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Arīnī, 'Abdullah bin Ṣāliḥ. Tt. *Al-Ittijāh al-Islāmī fi A'māl Najīb Kaylānī al-Qaṣasiyah*. Ttp. Tnp.
- Ashcroft, Bill., Griffiths, Gareth, and Tiffin, Helen (eds.). 1995. *The Post-Colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Ashcroft, Bill., Griffiths, Gareth, and Tiffin, Helen. 1998. *Key Concepts in Post-Colonial Studies*. London and New York: Routledge.
- Anderson, Benedict. 2001. *Komunitas-komunitas Terbayang*. (terj. Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirks, Nicholas B. 1992. "Pengantar: Kolonialisme dan Kebudayaan" dalam *Colonialism and Culture* (Dirks, Nicholas B. [Ed.]). Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Faruk. 1994. "Universalisme yang Menyangkal: Nasionalisme dalam Sastra" dalam *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasya, Teuku Kemal. 2001. "Jendela Kematian Nasionalisme" dalam *Poskolonialisme, Sikap Kritis Kita Terhadap Imperialisme* (Muhidin, M. Dahlan [pyt]). Yogyakarta: Jendela.
- Foulcher, Keith. 1994. "Mimikri Siti Nurbaya Catatan untuk Faruk". *Jurnal Kebudayaan Kalam*. Edisi ke 14. Jakarta.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. (terj. Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah). Yogyakarta: Qalam.
- Kaylānī, Najīb. 1969. *an-Nidā'u al-Khālīd*. Kuwait: Dar al-Bayān..
- Lo, Jacqueline and Helen Gilbert. 1998. "Postcolonial Theory: Possibilities and Limitation". Makalah pada An International Research Workshop University of Sidney.
- Said, Edward. W. 2001. *Orientalisme* (terj. Asep Hikmat). Bandung: Pustaka.
- , 1996. *Kebudayaan dan Kekuasaan*. Cet. II (terj. Rahmani Astuti). Bandung: Mizan.
- Sa'dawi, Nawal. 1980. *The Hidden Face of Eve, Women in the Arab World*. Sherif Hetata (trans. And ed.). London: Zed Press.
- Sarup, Madan. 1993. *An Introductory Guide to Poststructuralism and Posmodernism*. Second edition. Athens: University of Georgia Press.

Slemon, Stephen. 1995. "The Scramble for Post-Colonialism" dalam *The Post-Colonial Studies Reader*. (Aschroft, Bill. et. Al [ed.]). London and New York: Routledge.